

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.30 Tahun 2014.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.51 Tahun 2009.*

### B. Buku

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2003.*
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.*
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.*
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010.*
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.*
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.*

Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara: Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.

Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Wantu, Fence M. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Gorontalo: Reviva Cendikia, 2014.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

### C. Lain-lain

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", diterbitkan oleh *Jurnal of Intellectual Property*, (Vol.1 No.1 Tahun 2018). hlm. 18. Dengan link:  
<https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/viewFile/11142/8509>.

Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", diterbitkan oleh *Jurnal Konstitusi*, (Vol.7 No. 5 Oktober Tahun 2010), hlm. 153. Dengan link:  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/249>.

Fajrin, Alifia. "Indonesia Sebagai Negara Hukum". Dengan link:  
<https://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal 19 Maret 2021.

Fitria, "Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah", diterbitkan oleh *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 7 No.3 Tahun 2014) hlm. 100-101.  
Dengan link:  
<https://www.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2176>.

Glosarium. “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Dengan link: <https://tesishukum.com>. Diakses tanggal 17 Juli 2021.

Henri. “Macam-Macam, Prinsip-Prinsip dan Dasar Hukum Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata”, tersedia di : <https://butew.com/2019/07/08/macam-macamprinsip-prinsip>, diakses pada 20 Desember 2021.

Handoko, Nico Utama. “Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaanya”, diterbitkan oleh: *Pakuan Law Review*, (Vol. 06 No. 02 Juli-Desember 2020). hlm. 51.  
Dengan link:  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2140>.

Kusnandi, Nandang. “Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, diterbitkan oleh *Jurnal Nasional BLM Akreditasi*, (Vol. 1 No.7 Tahun 2011).  
Dengan link:  
[https://repository.unpak.ac.id/index.php?p=detail&id\\_karya=108](https://repository.unpak.ac.id/index.php?p=detail&id_karya=108).

Kurniadi, Dedy. “Beberapa Perubahan Dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law)”, diterbitkan oleh: Dedy Kurniadi & Co Lawyer.  
Dengan link:  
<https://dedykurniadi.com>.

Lahopang, Silvia Rahmawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, diterbitkan oleh: *Lex Administratum*, (Vol. VI No. 3 Juli-Agustus 2018), hlm. 161.  
Dengan link:  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22745>.

Maharani, Ida Ayu Rara Dwi dan Putu Tuni Cakabawa Landra. “Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, hlm. 6-7.

Dengan link:

<https://erepo.unud.ac.id>.

Muslih, Muhammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, diterbitkan oleh *Legalitas: Jurnal Hukum*, (Vol. IV No.1 Juni 2013), hlm. 134-137.

Dengan link:

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>.

Nana, Dede. “Terbengkalai 6 Tahun, Ratusan Putusan PTUN Tak Dilaksanakan, Ini Sanksinya”. Dengan link:

<https://jatimtimes.com/baca/209925/20200228/134800/terbengkalai-6-tahun-ratusan-putusan-ptun-tak-dilaksanakan-ini-sanksinya>.

Diakses tanggal 31 Agustus 2021.

Pattipawae, Dezonda Rosiana. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”. Diterbitkan oleh *SASI* (Vol.25 No. 1 Januari – Juni 2019), hlm. 96. Dengan link:

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/151>.

PTUN Jakarta. “Proses/ Alur Pemeriksaan Perkara TUN”, tersedia di:

<https://ptun-jakarta.go.id>, diakses pada 19 Desember 2021.

Putra, F.A. Satria. “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”, diterbitkan oleh *Justisi*, (Vol.7 No.1 Tahun 2021), hlm. 67. Dengan link:

<http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1201>.

Putra, Muhammad Amin. “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, diterbitkan oleh *Jurnal Hukum PERATUN*, (Vol. 3 No.1 February 2020). hlm. 2-3.

Dengan link:

[https://issuu.com/jurnalrestorasihukum/docs/jurnal\\_restorasi\\_hukum\\_volume\\_4\\_nomor\\_1\\_2019-min](https://issuu.com/jurnalrestorasihukum/docs/jurnal_restorasi_hukum_volume_4_nomor_1_2019-min).

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Putusan :  
183/G/2018/PTUN-JKT.

Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, diterbitkan oleh *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, (Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2012), hlm. 142-143.

Dengan link:

[https://www.researchgate.net/publication/282857816\\_NEGARA\\_HUKUM\\_INDONESIA\\_KEBALIKAN\\_NACHTWACHTERSTAAT](https://www.researchgate.net/publication/282857816_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_KEBALIKAN_NACHTWACHTERSTAAT).

Rumadan, Ismail. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, diterbitkan oleh: *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Vol. 1 Nomor 3 November 2012), hlm. 445.

Dengan link:

<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1201>.

Siadari, Ray Pratama. “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, tersedia di: <https://raypratama.blogspot.com>, diakses pada 20 Desember 2021.

Siallagan, Haposan. “Penerapan prinsip Negara Hukum di Indonesia”, diterbitkan oleh *Sosiohumaniora*, (Vol. 18 No.2 Juli 2016), hlm. 131-132. Dengan link:

<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>.

Soleh, Afifudin Mohammad. “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap”, diterbitkan oleh: *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2018), hlm. 25-30.

Dengan link:

<http://repository.untag-sby.ac.id>.

Sudarsono. “Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014”, diterbitkan oleh: *Tanjungpura Law Journal*, (Vol. 1 No. 2 Juli 2017). hlm. 172-173.

Dengan link:

<https://www.researchgate.net/publication>.

Sujino Agus, Salmo Eliezer dan Dezonda Rosiana. “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha”, diterbitkan oleh: *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1 Nomor 4 Juni 2021), hlm. 368.

Dengan link:

<https://fhukum.unpatti.ac.id>.

Utama, Kartika Widya., “Quo Vadis Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, diterbitkan oleh: *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*, (Vol. 44 No. 3 2015). hlm. 359.

Dengan link:

<https://www.neliti.com/id/journals/masalah-masalah-hukum/catalogue?page=6>.

Wahyudi, H. Yodi Martono. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, tersedia di: <https://ptun-jakarta.go.id>, diakses 22 November 2021.

Yuridisi, Tim. “Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), diakses melalui: <https://yuridis.id/jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-ptunperadilan-tata-usaha-negara>, pada tanggal 27 November 2021.

## **BIODATA PENULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

### **I. Identitas diri:**

Nama : Dewi Widya Puspita Sari  
NPM : 010117275  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 17 Mei 1999  
Program Konsentrasi : Bagian Hukum Ketatanegaraan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. HR Edi Sukma No.23 RT 01/07 Cigombong,  
Lido

### **II. Identitas keluarga:**

Nama Ayah : R. Dachyar Suhadi Wijayakusumah  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Evy Hapipah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. HR Edi Sukma No.23 RT 01/07 Cigombong,  
Lido

III. Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-Kanak : RA Nurul Magfiroh, Tahun 2004-2005

Sekolah Dasar : SDN 01 Cigombong, Tahun 2006-2011

SMP : SMPN 01 Cigombong, Tahun 2012-2014

SMA : SMAN 01 Cigombong, Tahun 2014-2017